

2. Adanya kemauan yang tinggi dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk tetap mengoptimalkan pelayanan walaupun dalam kondisi keterbatasan personel, sehingga tercipta budaya pelayanan yang baik.
3. Banyaknya tumbuh Perusahaan di Kabupaten Kapuas yang mensyaratkan dokumen kependudukan yang valid untuk diterima menjadi karyawan;

Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya jumlah pegawai dalam melaksanakan pelayanan, karena jumlah permintaan pelayanan selalu meningkat sedangkan jumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bertambah.
2. Letak geografis wilayah Kabupaten Kapuas yang sedemikian rupa, sedangkan pelayanan hanya terpusat di kota. Implikasinya aksesibilitas penduduk yang berada di wilayah pasang surut agak sulit, sehingga menyebabkan menurunnya minat untuk mengurus dokumen kependudukan

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

3.5.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, memberikan pelayanan yang representative dan pengelolaan kearsipan yang optimal. Adapun perangkat pendukung System Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dari pemerintah pusat berupa perangkat E-KTP telah terealisasi pada tahun 2012 dengan baik, sehingga perekaman E-KTP untuk database Kependudukan Kabupaten Kapuas masih terus berjalan.

3.5.2. Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian

Dengan 5 (lima) Program Strategis Nasional dimaksudkan untuk menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara modern untuk ikut mensukseskan Pemilu dan Pemilukada agar DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak bermasalah lagi, mencegah dokumen Kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan

manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakatmasyarakat.

3.5.3. Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi.

Untuk sasaran strategis jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Kalimantan Tengah, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan 2017-2021, yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- b. Tersedianya database kependudukan Provinsi Kalimantan Tengah yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- c. Meningkatnya pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna;
- d. Tercapainya penertiban administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dan standar operasional prosedur administrasi kependudukan;
- e. Terselenggaranya kesadaran masyarakat tentang terbit dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

3.5.4. Implementasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD.. Secara umum, berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan, ditinjau dari implikasi RTRW adalah :



1. Faktor Penghambat

- (1) Kabupaten Kapuas adalah daerah agrobisnis; berimplikasi tingginya jumlah pendatang dari luar daerah, sehingga menambah kompleknya permasalahan kualitas data kependudukan;
- (2) Letak geografis wilayah Kabupaten Kapuas yang sedemikian rupa, sedangkan pelayanan hanya terpusat di kota dan kantor kecamatan. Implikasinya aksesibilitas penduduk daerah hulu agak sulit, sehingga menyebabkan menurunnya minat untuk mengurus dokumen kependudukan.

2. Faktor Pendorong

- (1) Banyaknya tumbuh Perusahaan Perkebunan Sawit di Kabupaten Kapuas yang mensyaratkan dokumen kependudukan yang valid untuk diterima menjadi karyawan perusahaan;

3.5.5 Isu Strategis

Sebagaimana dikemukakan pada bagian sebelumnya, bahwa permasalahan yang paling dominan pada penyelenggaraan administrasi kependudukan antara lain :

1. Rendahnya kepemilikan dokumen kependudukan.
2. Rendahnya inovasi pelayanan.
3. Rendahnya pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
4. Tidak semua kecamatan terdapat jaringan dan sistem informasi
5. Database kependudukan belum valid.